

CENDIKIA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia

Volume 1, Nomor 2, Desember 2025

e-ISSN: xxxx-xxxx

Article Info:

Received date: 15 Desember 2025

Revised date : 16 Desember 2025

Accepted date: 17 Desember 2025

Sosialisasi Program Pembiayaan Mikro Untuk Pengusaha Lokal Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

**Selly Swandari^{1*}, Arsti Minatul Jannah², Akbar Lufi Zulfikar³,
Imelda Veronica Gea⁴,**

^{1,2,3,4}Universitas Mulawarman Samarinda

***Email Correspondence : Sellyswandari@feb.unmul.ac.id**

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan pengusaha lokal dalam mengakses pembiayaan mikro sebagai upaya mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kutai Timur. Mitra utama dalam kegiatan ini adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Timur, yang berperan strategis dalam pembinaan dan pemberdayaan pengusaha lokal. Permasalahan utama yang dihadapi mitra sasaran adalah rendahnya literasi keuangan, keterbatasan pengelolaan administrasi usaha, serta minimnya pemahaman terhadap program pembiayaan mikro formal yang tersedia. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif, partisipatif, dan pendampingan awal, yang meliputi sosialisasi program pembiayaan mikro, penyampaian materi literasi keuangan usaha, diskusi interaktif, serta pengenalan aspek administratif pembiayaan. Kegiatan dilaksanakan selama satu bulan pada Desember 2025 dan melibatkan pengusaha lokal binaan BRIDA Kabupaten Kutai Timur. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pengusaha lokal mengenai jenis, mekanisme, dan manfaat pembiayaan mikro, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan usaha yang tertib dan terstruktur. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat peran BRIDA sebagai fasilitator kebijakan dan penghubung antara program pembiayaan daerah dengan kebutuhan riil pengusaha lokal. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berkontribusi dalam mendukung penguatan akses pembiayaan mikro dan pemberdayaan ekonomi pengusaha lokal secara berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur.

Kata Kunci: Pembiayaan Mikro, Pengusaha Lokal, Kesejahteraan Ekonomi.

ABSTRACT

This Community Service activity aims to increase the understanding and readiness of local entrepreneurs to access microfinance as an effort to support the economic well-being of the community in East Kutai Regency. The primary partner in this activity is the Regional Research and Innovation Agency (BRIDA) of East Kutai Regency, which plays a strategic role in fostering and empowering local entrepreneurs. The main challenges faced by the target partners are low financial literacy, limited business administration management, and minimal understanding of available formal microfinance programs. The activity implementation method uses an educational, participatory approach and initial mentoring, which includes socialization of the microfinance program, delivery of business financial literacy materials, interactive discussions, and an introduction to the

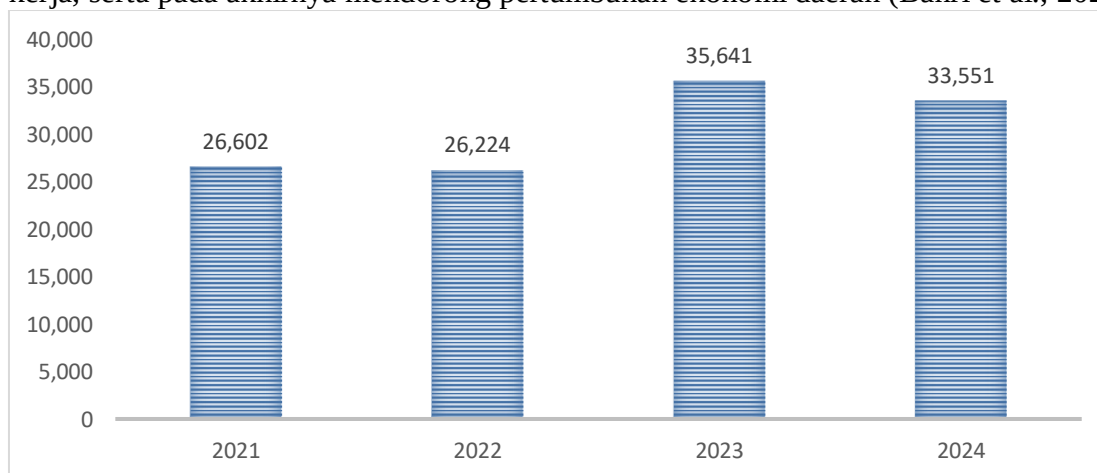
administrative aspects of financing. The activity will be carried out for one month in December 2025 and involves local entrepreneurs assisted by BRIDA in East Kutai Regency. The results of the activity indicate an increase in local entrepreneurs' understanding of the types, mechanisms, and benefits of microfinance, as well as a heightened awareness of the importance of orderly and structured business financial management. Furthermore, this activity also strengthens BRIDA's role as a policy facilitator and liaison between regional financing programs and the real needs of local entrepreneurs. Overall, this community service activity contributes to supporting the strengthening of access to microfinance and the sustainable economic empowerment of local entrepreneurs in East Kutai Regency.

Keywords: *Microfinance, Local Entrepreneurs, Economic Well-being.*

PENDAHULUAN

Pemanfaatan dan optimalisasi sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) salah satu indikator mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah yang teridentifikasi strategis di Indonesia Hal ini didukung dengan kondisi dimana wilayah tersebut memiliki potensi yang besar dalam aspek pembangunan ekonomi kerakyatan terutama melalui.

Studi yang dilakukan oleh Achmad, et.al (2023) juga menyebutkan bahwa UMKM merupakan salah satu sektor yang potensial yang dapat dijadikan sebagai alternatif sektor untuk mendorong peningkatan kinerja ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini didukung dengan situasi di mana sektor UMKM relatif berkontribusi tinggi bagi perekonomian Kalimantan Timur terutama pada jumlah usaha yang tinggi serta potensi penyerapan tenaga kerja yang besar. Untuk itu, optimalisasi sektor UMKM tersebut secara signifikan akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, serta pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Bahri et al., 2023).



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

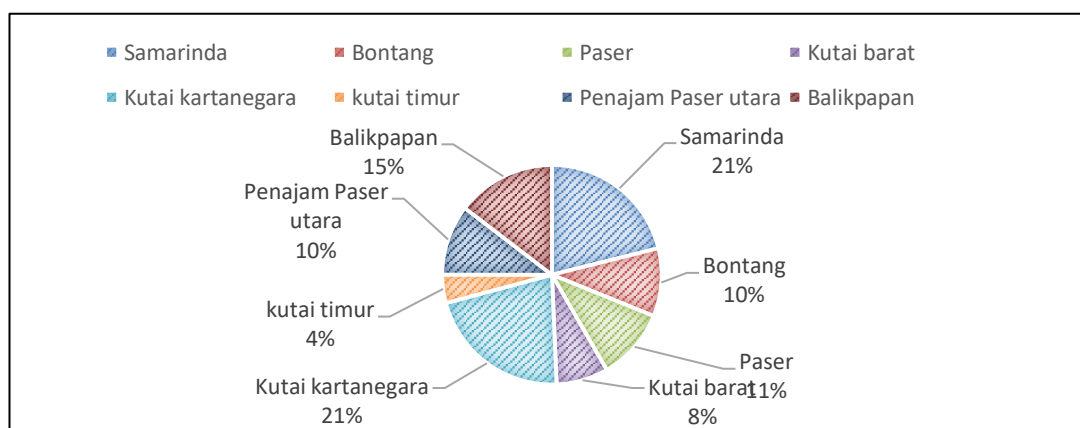
Grafik 1. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024

Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) di Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2021 sampai dengan 2024 menunjukkan dinamika yang berfluktuasi. Pada tahun 2021, jumlah UMKM tercatat sebesar 26.602 unit, yang mencerminkan kondisi awal pemulihan ekonomi pascapandemi. Pada tahun 2022, jumlah UMKM mengalami penurunan menjadi 26.224 unit, yang mengindikasikan masih adanya tekanan terhadap keberlangsungan usaha akibat keterbatasan modal dan pasar. Selanjutnya, pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 35.641 unit, yang menunjukkan membaiknya kondisi ekonomi serta

meningkatkan efektivitas kebijakan dan program pemberdayaan UMKM. Namun, pada tahun 2024 jumlah UMKM kembali menurun menjadi 33.551 unit meskipun demikian, jumlah UMKM pada tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa sektor UMKM tetap memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Dari perspektif sebaran UMKM menurut Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, tercatat bahwa Berdasarkan distribusi persentase UMKM menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur memiliki persentase sebesar 3,82 persen, yang merupakan kontribusi terendah dibandingkan daerah lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran UMKM di Kabupaten Kutai Timur terhadap total UMKM provinsi masih relatif terbatas.

Rendahnya kontribusi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum optimalnya pengelolaan keuangan usaha, seperti pencatatan keuangan yang sederhana, keterbatasan perencanaan arus kas, serta rendahnya akses terhadap pembiayaan formal. Selain itu, daya saing UMKM yang masih rendah, baik dari sisi kualitas produk, inovasi, maupun kemampuan pemasaran, turut membatasi kemampuan UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan daerah lain seperti Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Balikpapan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan penguatan daya saing UMKM menjadi aspek penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Kabupaten Kutai Timur agar kontribusinya terhadap perekonomian daerah dapat meningkat secara berkelanjutan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Grafik 2. Sebaran Usaha Industri Menengah Kecil (UMKM) Berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

Dalam hal ini, mitra utama dalam pengabdian masyarakat ini adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Timur, yang berperan dalam penunjukan dan pendampingan pengusaha lokal atau pelaku usaha mikro di Kabupaten Kutai Timur yang menghadapi kendala akses pembiayaan formal. Kelompok pengusaha lokal atau pelaku usaha mikro ini termasuk ke dalam kategori usaha yang memiliki potensi besar untuk berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah, namun terhambat oleh keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan, dan minimnya pemahaman terhadap program pembiayaan mikro

yang tersedia. Kondisi ini menyebabkan banyak pengusaha lokal masih mengandalkan sumber pembiayaan informal yang seringkali tidak menguntungkan, tidak berkelanjutan, dan justru dapat memperburuk kondisi keuangan usaha.

Berpijak pada uraian di atas, adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini antara lain: (1) meningkatkan pemahaman pengusaha lokal mengenai berbagai program pembiayaan mikro yang tersedia, baik dari perbankan, lembaga keuangan non-bank, maupun program pemerintah pusat dan daerah, (2) meningkatkan literasi keuangan dan keterampilan administrasi usaha pengusaha lokal agar lebih siap dalam mengakses pembiayaan formal secara legal dan berkelanjutan, (3) mendorong pemanfaatan program pembiayaan mikro sebagai instrumen strategis dalam pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, serta (4) membangun sinergi kolaboratif antara perguruan tinggi, pemerintah daerah (BAPPERIDA), dan lembaga keuangan dalam mendukung ekosistem pembiayaan inklusif bagi pengusaha lokal di Kabupaten Kutai Timur. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan pengusaha lokal dapat mengoptimalkan akses pembiayaan untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro atau microfinance merupakan penyediaan layanan keuangan berskala kecil yang ditujukan kepada pelaku usaha mikro, pengusaha kecil, dan masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses memadai terhadap sistem perbankan konvensional.

Robinson (2001) mendefinisikan pembiayaan mikro sebagai layanan keuangan untuk pengusaha dan individu dengan pendapatan rendah yang mencakup pinjaman, tabungan, asuransi mikro, transfer uang, dan jasa keuangan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan segmen mikro.

Menurut Ledgerwood (1999), pembiayaan mikro memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari pembiayaan konvensional, yaitu jumlah pinjaman yang relatif kecil, prosedur yang lebih sederhana, persyaratan agunan yang lebih fleksibel atau bahkan tanpa agunan, jangka waktu pinjaman yang lebih pendek, dan pendekatan yang lebih personal dalam pelayanan.

Dalam konteks regulasi di Indonesia, pembiayaan mikro telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang memberikan landasan hukum bagi operasionalisasi lembaga keuangan yang khusus melayani sektor mikro, termasuk koperasi simpan pinjam, bank perkreditan rakyat, dan lembaga keuangan mikro non-bank lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang belum atau kurang terlayani oleh lembaga keuangan formal.

B. Peran Pembiayaan Mikro dalam Pembangunan Ekonomi

Pembiayaan mikro memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam aspek pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga. Muhammad Yunus (2007), pelopor konsep pembiayaan mikro dan pendiri Grameen Bank, menyatakan bahwa akses terhadap kredit mikro dapat membantu keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan dengan memberikan modal untuk mengembangkan usaha produktif. Di tingkat makro, pembiayaan mikro berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui beberapa

mekanisme, pertama pembiayaan mikro mendorong pertumbuhan sektor UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional, kedua pembiayaan mikro menciptakan multiplier effect melalui peningkatan daya beli masyarakat dan perputaran uang di ekonomi lokal, ketiga pembiayaan mikro mendorong inklusi keuangan dengan menjangkau segmen masyarakat yang selama ini tidak terlayani oleh sistem keuangan formal. Penelitian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (2020) menunjukkan bahwa akses terhadap pembiayaan mikro berkorelasi positif dengan peningkatan pendapatan rumah tangga, peningkatan aset produktif, dan perbaikan kondisi kesejahteraan secara umum. Di Indonesia, program-program pembiayaan mikro seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah terbukti memberikan dampak positif terhadap pengembangan UMKM dan penciptaan lapangan kerja yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

C. Literasi Keuangan dan Akses Pembiayaan

Literasi keuangan didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk memahami dan menggunakan berbagai keterampilan keuangan secara efektif, termasuk pengelolaan keuangan pribadi, penganggaran, investasi, dan pemanfaatan produk-produk keuangan. Menurut OECD (2005), literasi keuangan mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang sehat dan pada akhirnya mencapai kesejahteraan keuangan individu.

Dalam konteks usaha mikro, literasi keuangan mencakup kemampuan dalam pencatatan transaksi usaha, penyusunan laporan keuangan sederhana, analisis kelayakan usaha, dan pemahaman tentang produk-produk pembiayaan yang tersedia. Tingkat literasi keuangan yang rendah menjadi salah satu hambatan utama dalam mengakses pembiayaan formal, hal ini diperkuat oleh penelitian Lusardi dan Mitchell (2014) yang menunjukkan bahwa literasi keuangan berkorelasi positif dengan kemampuan individu dalam membuat keputusan keuangan yang tepat, termasuk dalam hal akses dan pemanfaatan produk pembiayaan, dimana individu dengan literasi keuangan yang tinggi cenderung lebih mampu memahami persyaratan pembiayaan, menghitung beban bunga, mengelola pinjaman dengan baik, dan menghindari over-indebtedness. Di Indonesia, survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan nasional mencapai 49,68 persen, yang berarti hampir separuh masyarakat Indonesia belum memiliki literasi keuangan yang memadai, dan angka ini lebih rendah lagi untuk segmen pelaku usaha mikro terutama di daerah-daerah dengan akses pendidikan dan informasi yang terbatas.

D. Hambatan Akses Pembiayaan bagi Usaha Mikro

Menurut Bank Indonesia (2023), terdapat beberapa hambatan utama yang dihadapi oleh usaha mikro dalam mengakses pembiayaan formal yang dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok besar. Pertama, hambatan dari sisi demand atau pelaku usaha yang meliputi literasi keuangan yang rendah, ketidakpahaman terhadap prosedur dan persyaratan pembiayaan, ketidakmampuan menyusun proposal dan dokumen administratif, persepsi negatif terhadap lembaga keuangan formal, ketiadaan agunan yang memadai, serta ketakutan terhadap beban bunga dan risiko gagal bayar. Kedua, hambatan dari sisi supply atau lembaga keuangan yang meliputi prosedur yang dianggap rumit dan memakan waktu, persyaratan yang ketat dan tidak fleksibel, biaya transaksi yang tinggi untuk pinjaman kecil, kurangnya pemahaman terhadap karakteristik usaha mikro, serta tingginya perceived risk terhadap segmen mikro. Ketiga, hambatan struktural yang meliputi keterbatasan infrastruktur keuangan di daerah terpencil, rendahnya penetrasi lembaga keuangan formal, kurangnya sosialisasi dan edukasi yang terstruktur, serta lemahnya koordinasi antar

stakeholder dalam ekosistem pembiayaan mikro. Memahami hambatan-hambatan ini sangat penting untuk merancang intervensi yang tepat dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro, dimana sosialisasi program pembiayaan mikro yang terstruktur dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi hambatan dari sisi informasi dan literasi keuangan.

E. Teori Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan adalah kondisi di mana setiap orang memiliki akses terhadap layanan keuangan formal yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau, yang disediakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Menurut World Bank (2018), inklusi keuangan menjadi agenda penting dalam pembangunan ekonomi karena terbukti berkorelasi dengan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017 menetapkan visi untuk meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia melalui lima pilar utama yaitu edukasi keuangan, hak konsumen, fasilitas keuangan, regulasi, dan infrastruktur.

Salah satu pilar strategi yang paling krusial adalah edukasi keuangan yang terstruktur dan masif kepada berbagai segmen masyarakat, termasuk pelaku UMKM, melalui program sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang melibatkan berbagai stakeholder seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan perguruan tinggi. Program sosialisasi pembiayaan mikro seperti yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sejalan dengan upaya peningkatan inklusi keuangan, khususnya dalam aspek akses dan penggunaan produk keuangan oleh segmen usaha mikro yang selama ini kurang terlayani oleh sistem keuangan formal, sehingga diharapkan dapat berkontribusi terhadap pemerataan akses pembiayaan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

A. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Timur sebagai mitra utama kegiatan. Penetapan BRIDA sebagai mitra utama didasarkan pada peran strategis lembaga tersebut dalam perencanaan pembangunan daerah, koordinasi riset dan inovasi, serta pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan penguatan kapasitas pengusaha lokal dan pelaku usaha mikro.

Secara operasional, pelaksanaan kegiatan PKM terpusat pada fasilitas dan wilayah kerja yang dikoordinasikan oleh BRIDA Kabupaten Kutai Timur, termasuk lokasi sosialisasi dan pendampingan yang direkomendasikan oleh mitra. Fokus wilayah pelaksanaan berada di Kecamatan Sangatta Utara dan sekitarnya, yang merupakan pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi daerah serta menjadi wilayah prioritas dalam program pembinaan pengusaha lokal yang dikelola oleh BRIDA.

Melalui peran BRIDA sebagai mitra utama, kegiatan ini tidak hanya menysasar pengusaha lokal sebagai peserta, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat fungsi kelembagaan BRIDA dalam melakukan diseminasi kebijakan, sosialisasi program pembiayaan mikro, serta pendampingan awal bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Kutai Timur. Dengan demikian, lokasi kegiatan ditetapkan berdasarkan pertimbangan efektivitas koordinasi kelembagaan, kemudahan akses peserta, serta kesesuaian dengan program dan agenda pembangunan ekonomi daerah yang dijalankan oleh BRIDA.

B. Waktu Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan selama satu bulan, yaitu pada bulan Desember 2025, sesuai dengan kesepakatan dan jadwal yang ditetapkan bersama BRIDA Kabupaten Kutai Timur sebagai mitra utama. Penentuan waktu pelaksanaan mempertimbangkan kesiapan kelembagaan mitra, ketersediaan pengusaha lokal binaan BRIDA sebagai peserta, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam satu siklus pengabdian yang terstruktur. Secara sistematis, pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam beberapa tahapan utama yang terintegrasi dengan peran BRIDA, yaitu:

- 1) Tahap persiapan dan koordinasi, yang meliputi rapat koordinasi dengan BRIDA Kabupaten Kutai Timur, penentuan sasaran pengusaha lokal binaan, penyusunan materi sosialisasi sesuai kebutuhan mitra, serta persiapan teknis pelaksanaan kegiatan;
- 2) Tahap pelaksanaan kegiatan, yang meliputi sosialisasi program pembiayaan mikro, penyampaian materi literasi keuangan usaha, diskusi partisipatif, serta pendampingan awal administratif pembiayaan yang difasilitasi bersama oleh tim pengabdian dan BRIDA;
- 3) Tahap evaluasi dan pelaporan, yang meliputi evaluasi capaian kegiatan bersama mitra, pengumpulan umpan balik dari peserta dan BRIDA, serta penyusunan laporan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan kelembagaan.

Pembagian waktu yang terencana dan terkoordinasi dengan BRIDA Kabupaten Kutai Timur ini diharapkan dapat memastikan bahwa kegiatan PKM tidak hanya berdampak pada peningkatan pemahaman pengusaha lokal, tetapi juga memperkuat peran mitra utama dalam pengelolaan dan keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi berbasis pembiayaan mikro di Kabupaten Kutai Timur.

C. Metode Pendekatan yang Digunakan

Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dirancang secara edukatif, partisipatif, dan berbasis pendampingan, dengan menempatkan BRIDA Kabupaten Kutai Timur sebagai mitra utama kelembagaan dan pengusaha lokal sebagai mitra sasaran penerima manfaat langsung. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa kegiatan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas, mengubah persepsi, serta mendorong kesiapan pengusaha lokal dalam mengakses pembiayaan mikro secara formal dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tahapan yang telah disusun pada Bab III, melalui koordinasi intensif dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Timur sebagai mitra utama. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung selama bulan Desember 2025 dan melibatkan pengusaha lokal binaan BRIDA sebagai mitra sasaran.

Proses kegiatan diawali dengan tahap koordinasi kelembagaan antara tim pengabdian dan BRIDA, yang bertujuan untuk menyepakati mekanisme pelaksanaan, penentuan peserta, serta penyelarasan materi sosialisasi dengan program dan kebijakan pembiayaan mikro yang berlaku di Kabupaten Kutai Timur. Pada tahap ini, BRIDA berperan aktif dalam menyediakan data awal dan memfasilitasi komunikasi dengan pengusaha lokal. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan sosialisasi program pembiayaan mikro yang dilakukan secara tatap muka. Kegiatan sosialisasi berlangsung secara interaktif melalui pemaparan materi, diskusi, dan sesi tanya jawab. Pengusaha lokal menunjukkan tingkat

partisipasi yang tinggi, terutama dalam menyampaikan pengalaman dan kendala yang mereka hadapi dalam mengakses pembiayaan formal. Proses ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif yang digunakan mampu menciptakan ruang dialog yang konstruktif antara tim pengabdian, BRIDA, dan pengusaha lokal.

Setelah kegiatan sosialisasi, dilakukan pendampingan awal yang difokuskan pada aspek literasi keuangan dan kesiapan administratif. Pendampingan ini bersifat pengenalan dan bertujuan untuk memberikan gambaran praktis kepada pengusaha lokal mengenai langkah-langkah awal yang perlu dipersiapkan sebelum mengajukan pembiayaan mikro secara formal. Seluruh proses pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan mendapat dukungan penuh dari mitra utama.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian

B. Hasil yang Dicapai Dibandingkan dengan Tujuan Awal

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya kesesuaian yang kuat antara tujuan awal kegiatan dan capaian yang diperoleh. Tujuan utama kegiatan adalah meningkatkan pemahaman pengusaha lokal mengenai program pembiayaan mikro serta meningkatkan literasi keuangan dan kesiapan administratif dalam mengakses pembiayaan formal.

Berdasarkan hasil diskusi, tanya jawab, dan umpan balik peserta, terlihat adanya peningkatan pemahaman pengusaha lokal mengenai jenis-jenis pembiayaan mikro, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan syariah, dana bergulir, dan program pembiayaan daerah. Pengusaha lokal yang sebelumnya tidak mengetahui perbedaan karakteristik masing-masing skema pembiayaan menjadi lebih memahami manfaat, persyaratan, serta risiko yang melekat pada setiap jenis pembiayaan.

Selain itu, kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran pengusaha lokal akan pentingnya pengelolaan keuangan usaha yang lebih tertib. Peserta mulai memahami pentingnya pencatatan keuangan sederhana dan pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi sebagai prasyarat utama dalam mengakses pembiayaan formal. Meskipun belum seluruh peserta mampu menerapkan secara langsung, terdapat perubahan sikap dan persepsi yang positif terhadap praktik pengelolaan keuangan usaha. Dari sisi kelembagaan, kegiatan ini juga mendukung tujuan BRIDA Kabupaten Kutai Timur dalam memperkuat fungsi sosialisasi dan pembinaan pengusaha lokal. BRIDA memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi, kebutuhan, dan kesiapan pengusaha lokal dalam

mengakses pembiayaan mikro, yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan program lanjutan.

C. Dampak Terhadap Mitra atau Masyarakat Sasaran

Pelaksanaan kegiatan PKM ini memberikan dampak yang dapat dilihat pada dua level, yaitu dampak terhadap mitra utama dan dampak terhadap mitra sasaran.

- 1) Bagi BRIDA Kabupaten Kutai Timur, kegiatan ini memberikan dampak berupa penguatan peran kelembagaan dalam menjalankan fungsi diseminasi kebijakan dan program pembiayaan mikro. Kegiatan ini juga memperkaya basis informasi BRIDA mengenai profil dan karakteristik pengusaha lokal, khususnya terkait literasi keuangan dan kesiapan akses pembiayaan. Dampak ini penting sebagai landasan bagi BRIDA dalam merancang program pembinaan dan pendampingan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
- 2) Bagi pengusaha lokal sebagai mitra sasaran, kegiatan ini memberikan dampak berupa peningkatan pengetahuan dan perubahan persepsi terhadap pembiayaan formal. Pengusaha lokal menjadi lebih terbuka terhadap lembaga keuangan dan mulai memandang pembiayaan mikro sebagai peluang strategis untuk pengembangan usaha, bukan sebagai beban atau risiko semata. Selain itu, muncul kesadaran awal mengenai pentingnya tata kelola keuangan usaha yang lebih baik sebagai bagian dari proses profesionalisasi usaha mikro.

Secara tidak langsung, dampak kegiatan ini juga berkontribusi pada penguatan ekosistem pembiayaan mikro di tingkat daerah, karena terciptanya hubungan yang lebih sinergis antara pengusaha lokal, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi.

D. Analisis Keberhasilan dan Kendala Selama Pelaksanaan

Keberhasilan kegiatan PKM ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung utama. Pertama, keterlibatan aktif BRIDA Kabupaten Kutai Timur sebagai mitra utama memungkinkan pelaksanaan kegiatan yang terkoordinasi dengan baik dan selaras dengan kebutuhan lapangan. Kedua, pendekatan edukatif-partisipatif yang digunakan mampu meningkatkan keterlibatan dan antusiasme peserta. Ketiga, materi yang disusun secara kontekstual dan aplikatif memudahkan pengusaha lokal dalam memahami substansi pembiayaan mikro.

Namun demikian, selama pelaksanaan kegiatan juga ditemukan beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah heterogenitas tingkat pemahaman dan latar belakang pendidikan pengusaha lokal, sehingga diperlukan penyesuaian penyampaian materi secara berulang dan bertahap. Selain itu, keterbatasan waktu pelaksanaan PKM menyebabkan pendampingan yang dilakukan masih bersifat awal dan belum dapat menjangkau seluruh aspek pengelolaan usaha secara mendalam.

Kendala lain yang muncul adalah masih kuatnya persepsi kehati-hatian pengusaha lokal terhadap pembiayaan formal, yang tidak dapat diubah secara instan melalui satu kali kegiatan sosialisasi. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut berupa pendampingan berkelanjutan yang melibatkan BRIDA dan pihak terkait lainnya. Secara keseluruhan, meskipun terdapat kendala, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat dinilai

berhasil mencapai tujuan utama dan memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan program pemberdayaan ekonomi berbasis pembiayaan mikro di Kabupaten Kutai Timur.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema Sosialisasi Program Pembiayaan Mikro untuk Pengusaha Lokal dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat telah dilaksanakan dengan baik melalui kemitraan strategis antara perguruan tinggi dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Timur sebagai mitra utama. Pelaksanaan kegiatan ini dirancang untuk menjawab permasalahan utama yang dihadapi pengusaha lokal, khususnya keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal akibat rendahnya literasi keuangan dan kesiapan administratif usaha.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi program pembiayaan mikro yang dilakukan secara edukatif, partisipatif, dan berbasis pendampingan awal mampu meningkatkan pemahaman pengusaha lokal mengenai jenis, mekanisme, serta manfaat pembiayaan mikro. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong perubahan persepsi pengusaha lokal terhadap lembaga keuangan formal dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan usaha yang lebih tertib dan terstruktur.

Dari sisi kelembagaan, kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam memperkuat peran BRIDA Kabupaten Kutai Timur sebagai fasilitator pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penghubung antara kebijakan pembiayaan daerah dengan kebutuhan riil pengusaha lokal. Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi pengusaha lokal sebagai mitra sasaran, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan mitra utama dalam mengelola dan mengembangkan program pembiayaan mikro secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, R., Hidayat, S., & Nuraini, D. (2023). Peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, 8(2), 115–128. <https://doi.org/10.xxxx/jepd.v8i2.xxx>
- Asian Development Bank. (2020). *Microfinance and inclusive growth in Asia*. Asian Development Bank. <https://www.adb.org>
- Bahri, S., Lestari, E., & Prasetyo, A. (2023). Kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 15(1), 45–58. <https://doi.org/10.xxxx/jmk.v15i1.xxx>
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan perekonomian Indonesia 2023*. Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id>
- Ledgerwood, J. (1999). *Microfinance handbook: An institutional and financial perspective*. World Bank.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
- Muhammad Yunus. (2007). *Creating a world without poverty: Social business and the future of capitalism*. PublicAffairs.
- OECD. (2005). *Improving financial literacy: Analysis of issues and policies*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Strategi nasional literasi keuangan Indonesia*. OJK. <https://www.ojk.go.id>

- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2022. OJK. <https://www.ojk.go.id>
- Rahman, A., & Putri, N. A. (2020). Peningkatan literasi keuangan usaha mikro melalui program pendampingan berbasis komunitas. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 89–101.
- Robinson, M. S. (2001). *The microfinance revolution: Sustainable finance for the poor*. World Bank.
- Sari, M., Nugroho, R., & Kurniawan, T. (2021). Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai upaya peningkatan akses pembiayaan UMKM. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(1), 33–44.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Wibowo, H., Santoso, B., & Lestari, R. (2022). Model kolaborasi perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM berbasis pembiayaan mikro. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(3), 201–215.
- World Bank. (2018). *Financial inclusion overview*. World Bank Group. <https://www.worldbank.org>
- Zulfikar, A. L., Widayati, N., Swandari, S., Angel, P., & Suwandi, A. (2025). Penguatan Usaha Berbasis Ekonomi Digital UMKM Melalui Produksi Dan Distribusi Digital Makanan Ringan Sehat Di Muara Jawa Tengah Kabupaten Kutai Kartanegara. *CENDIKIA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(1), 109-115.